

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebutuhan akan Audit

Mulyadi dan Puradireja (1998) mengatakan bahwa audit adalah *“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”*.

Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atau pernyataan atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil-hasil tersebut kepada pihak pengguna laporan (Malan *et al.*, 1984).

Secara teknis, pelaksanaan audit pada sektor publik dan sektor swasta adalah sama. Menurut Jones & Bates (1990) yang membedakan pelaksanaan audit dua sektor tersebut adalah pada kebutuhan yang mendasari untuk melaporkan pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, audit sektor publik memiliki cakupan tugas dan memiliki tanggungjawab yang lebih luas dari pada audit pada sektor swasta.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang- undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemeriksaan oleh BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang membedakan antara sektor publik dan sektor swasta adalah dalam sektor publik terdapat audit kinerja.

Yuliati *et al.* (2007) menyatakan bahwa auditor adalah orang atau lembaga yang melakukan audit. Auditor sektor publik, selanjutnya dibatasi auditor pemerintah, adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Messier *et al.* dalam Setyorini (2010) menambahkan bahwa auditor pemerintah dipekerjakan oleh negara dan secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari kategori yang lebih luas dari auditor internal. Pasal 23 E ayat 1 Undang- undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada auditor eksternal pemerintah yaitu auditor BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Pasal 1 ayat 1 Undang- undang No 15 Tahun 2006 menjelaskan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Beberapa teori terkait dengan fungsi audit :

a. *Policeman theory.*

Menurut teori ini, auditor bertanggung jawab untuk menemukan kecurangan pada laporan keuangan. Auditor berperan layaknya seorang polisi yang fokus pada ketepatan aritmatik dan melakukan upaya untuk mendeteksi serta mencegah adanya kecurangan (Rachman, 2014).

b. *Credibility theory.*

Teori ini menyatakan bahwa fungsi dari audit adalah untuk memberi nilai tambah bagi suatu entitas/ organisasi atas laporan keuangannya sehingga menambah keyakinan pengguna laporan keuangan. Informasi hasil audit bukanlah basis utama bagi investor dalam membuat keputusan (Porter dalam Rachman, 2014).

c. *Quasi-judicial theory.*

Teori ini mendasarkan peran auditor layaknya seperti seorang hakim dalam proses distribusi keuangan (Hayes *et al.* dalam Rachman, 2014). Porter menyimpulkan bahwa (i) keputusan auditor dan proses pembuatan keputusan tidak tersedia untuk publik (ii) doktrin mengenai keteladanan/konsistensi tidak dijamin dalam proses audit, dan (iii) independensi auditor berbeda dari independensi hakim karena perbedaan sistem mengenai penghargaan (*reward*) yang diterapkan.

d. *Theory of inspired confidence.*

Teori ini melihat dari sudut pandang permintaan dan penawaran terkait dengan jasa audit sebagai dampak langung dari adanya kepentingan *stakeholder*

dalam suatu entitas/ organisasi. *Stakeholder* meminta pertanggung jawaban kepada pihak manajemen atas pengelolaan keuangan yang telah dipercayakan kepada mereka. Jasa audit diperlukan untuk memberi keyakinan kepada *stakeholder* bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

e. Teori *Agency*.

Konsep *Agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Rahmawati (2012) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Menurut Eisenhardt dalam Rahmawati (2012), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Menurut Zimmerman dalam Hilmi dan Martani (2012) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agent*, untuk menjalankan tugas

pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai *agent* karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada *agent* baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principles* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.

Moe dalam Hilmi dan Martani (2012) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Fadzil dan Nyoto dalam Hilmi dan Martani (2012) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal-agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Teori Persepsi

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk individu. Dalam melihat suatu masalah setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya. Hal ini pula yang menyebabkan persepsi setiap individu memiliki perbedaan. Persepsi menurut manusia yang satu belum tentu sama dengan persepsi manusia yang lainnya, karena adanya

perbedaan dari pengalaman serta lingkungan sekitar dari manusia tersebut tinggal.

Untuk lebih memahami persepsi, berikut adalah beberapa definisi persepsi menurut para ahli, diantaranya:

- 1) Desiderato, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*) (Rakhmat dalam Malihatin, 2012).
- 2) Branca, mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang didahului oleh penginderaan (Walgito dalam Malihatin, 2012).
- 3) Moskowitz dan Orgel, persepsi merupakan proses yang *intergrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya (Walgito dalam Malihatin, 2012).
- 4) Epstein dan Roger, persepsi adalah seperangkat proses dengan mengenali, mengorganisasikan, dan memahami serapan- serapan inderawi yang diterima dari stimuli lingkungan (Sternberg dalam Malihatin, 2012).
- 5) Joseph A. Devito, persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita (Mulyana dalam Malihatin, 2012).

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan persepsi merupakan suatu proses pemberian makna atau proses pemahaman diri di dalam diri seseorang terhadap suatu objek, baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud. Dalam hal ini persepsi sangat berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya :

1. Motif dan kebutuhan.
2. Kesiapan seseorang untuk berespon terhadap suatu input tertentu, tetapi tidak pada input lainnya.

Faktor eksternal diantaranya adalah :

1. Intensitas dan ukuran dari yang akan diberikan atensi.
2. Kontras dan hal-hal yang baru dari objek yang mendapat perhatian.
3. Pengulangan dari yang diberi persepsi.
4. Gerakan yang diberi persepsi.

Kemampuan persepsi adalah sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini. Meskipun kebanyakan kemampuan persepsi bersifat bawaan, pengalaman juga memainkan peranan penting. Secara keseluruhan, kemampuan persepsi kita ditanamkan dan tergantung pada pengalaman.

- a. Proses terjadinya persepsi.

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa obyek menimbulkan

stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh indera yang diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.

b. Faktor yang mempengaruhi persepsi.

1) Diri yang bersangkutan

Apabila seseorang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat. Karakteristik individu yang turut berpengaruh antara lain sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan harapan.

2) Sasaran persepsi yang mungkin berupa orang, benda atau peristiwa.

Sasaran ini berpengaruh antara persepsi.

3) Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang artinya bahwa dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu mendapatkan perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam menumbuhkan persepsi.

Sementara David Krech dan Richard dalam Malihatn (2012), menyebutkan sebagai faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional dan faktor personal.

1) Faktor Fungsional, adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal- hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor- faktor personal. Faktor personal yang menentukan persepsi

adalah objek- objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

- 2) Faktor Struktural, adalah faktor yang berasal semata- mata dari sifat. Stimulus fisik efek- efek saraf yang ditimbulkan pada system saraf individu.
- 3) Faktor- faktor situasional. Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.
- 4) Faktor personal. Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian.

3. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan menelusur siapa yang menjadi *stakeholder* organisasi. Drebin *et al.* dalam Mardiasmo (2009) mengidentifikasi terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya.

Kesepuluh kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah:

- a. Pembayar pajak (*tax payer*),
- b. Pemberi dana bantuan (*grantors*),
- c. Investor,

- d. Pengguna jasa (*fee-paying service recipients*),
- e. Karyawan/ pegawai,
- f. Pemasok (*vendors*),
- g. Dewan legislatif,
- h. Manajemen,
- i. Pemilih (*voters*),
- j. Badan pengawas (*oversight bodies*).

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan legislatif dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan, yaitu:

- a. Masyarakat;
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.

4. *Expectation Gap*

Expectation gap menurut Ligio dalam Yandi (2013) adalah perbedaan pandangan mengenai tingkat kinerja yang diharapkan antara akuntan independen dengan pengguna laporan keuangan, seperti direktur keuangan, analis keuangan, analis investasi, dan jurnalis investasi. Menurut Guy dan Sullivan (1988), *expectation gap* adalah perbedaan antara apa yang masyarakat dan pengguna laporan keuangan percaya sebagai tanggung jawab akuntan dan auditor dan apa yang akuntan dan auditor percayai sebagai tanggung jawabnya.

Berdasarkan definisi- definisi yang ada, maka penekanan dari *expectation gap* adalah harapan masyarakat atau pemakai laporan keuangan terhadap auditor tentang laporan keuangan secara nyata melebihi peran auditor dan opini auditnya.

Salehi (2011) menyatakan bahwa komponen-komponen dari *audit expectation gap* dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Gap* di antara yang layak diharapkan dari auditor dan auditor menampilkan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang;
- b. *Gap* di antara standar kinerja auditor yang diharapkan auditor dan tugas- tugas yang diharapkan dan dirasa oleh masyarakat.

5. **Tingkat Pendidikan**

Menurut Notoatmodjo dalam Afifah (2015), pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan. Pendidikan disini adalah pendidikan jangka panjang atau pendidikan formal yang telah didapat oleh

pengguna laporan keuangan, sedangkan pendidikan jangka pendek disebut dengan pelatihan.

Perbedaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi secara teori dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Pendidikan	Pelatihan
1	Pengembangan Kemampuan	Menyeluruh	Spesifik
2	Area Kemampuan	Kognitif, afektif dan psikomotor	Psikomotor
3	Jangka waktu pelaksanaan	Panjang	Pendek
4	Materi yang diberikan	Lebih umum	Lebih khusus
5	Penekanan penggunaan metode belajar- mengajar	Konvensional	Inkonvensional
6	Penghargaan akhir proses	Gelar	Sertifikat

Sumber : Fakri Hilmi (2011)

Dengan tingkat pendidikan yang memadai, seorang pengguna diharapkan dapat memahami arti atau maksud dari laporan keuangan auditan sehingga dengan pemahaman bahwa laporan keuangan yang diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor BPK tidak mengindikasikan bahwa laporan tersebut bebas dari korupsi karena peran dan tanggung jawab auditor BPK sebagaimana yang terdapat dalam Undang- undang adalah untuk memberi opini atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

6. Pelatihan

Pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek dari pada teori (Rivai dan Sagala, 2009).

Menurut Sri Haryanti dalam Afifah (2015) pelatihan memiliki fungsi-fungsi yang edukatif, administratif dan personal. Dari fungsi edukatif mengacu pada peningkatan kemampuan profesional, kepribadian, dedikasi dan loyalitas pada organisasi. Fungsi administratif mengacu pada pemenuhan syarat-syarat administrasi seperti promosi dan pembinaan karir. Terakhir adalah fungsi personal yang menekankan pada pembinaan kepribadian dan bimbingan personal untuk mengatasi kesulitan dan masalah dalam pekerjaan.

7. Pengalaman Kerja

Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci, lengkap dan canggih (*Sophisticated*) dibanding seseorang yang belum berpengalaman.

Pengalaman kerja adalah suatu dasar/ acuan seorang karyawan dapat menempatkan diri secara tepat kondisi, berani mengambil resiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan baik terhadap berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas, kinerja dan menghasilkan individu yang kompeten dalam bidangnya (Sutrisno dalam Septiani, 2015).

Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor (Davis dalam Saputra dan Yasa, 2013). Pengalaman kerja seorang auditor akan mendukung keterampilan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan akan semakin berkurang (Widhiati dalam Saputra dan Yasa, 2013).

Dari sisi pengguna laporan keuangan auditan, pengalaman yang dimiliki dalam bidang keuangan akan mendukung keterampilan dan pemahaman dalam menyelesaikan pekerjaannya dan akan mampu memahami maksud atau arti dari opini yang diberikan oleh BPK.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *expectation gap* sudah pernah dilakukan dalam sektor publik di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2000) membuktikan adanya *expectation gap* antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai peran dan tanggung jawab auditor, di mana auditor mempunyai persepsi yang lebih tinggi dari pada pemakai laporan keuangan terhadap faktor memperbaiki keefektivan audit. Sedangkan pada faktor pengkomunikasian hasil audit tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan. Yang dimaksud pemakai laporan keuangan dalam penelitian Yeni (2000) adalah para pengguna laporan keuangan dari sektor swasta, diantaranya adalah para investor dan kreditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2004) menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan persepsi antara auditor dengan pemakai laporan keuangan auditan pemerintah (anggota DPRD), (2) ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan sektor swasta dengan pemakai laporan keuangan pemerintah, dan (3) tidak ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan pemerintah di sektor pemerintahan daerah satu dengan pemakai laporan keuangan pemerintah daerah lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati *et al.* (2007) membuktikan bahwa terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap peran dan tanggung jawabnya dibanding pemakai laporan keuangan pemerintah. Tidak terdapat *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor mendeteksi dan melaporkan kecurangan dan pada faktor mempertahankan sikap independensi sedangkan pada faktor mengkomunikasikan hasil audit dan faktor memperbaiki keefektivan audit terdapat *expectation gap*. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih baik daripada pemakai laporan keuangan pemerintah untuk memperbaiki keefektivan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusliyawati dan Abdul Halim (2008) membuktikan adanya perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda dan masyarakat dilihat dari sisi pelaporan, akuntabilitas, dan dari sisi konsep-konsep audit yaitu independensi, kompetensi, pendapat wajar dan audit kinerja. Perbedaan persepsi tersebut menimbulkan *expectation gap* antara auditor dan pengguna laporan keuangan daerah di mana perbedaan persepsi yang terbesar terjadi antara auditor BPK dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarso dalam Setyorini (2010) menemukan bahwa terdapat *audit expectation gap* antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan pemerintah anggota DPRD, pemeriksa

Bawasda/Inspektorat, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, terdapat *audit expectation gap* antar pengguna laporan keuangan pemerintah dan tidak terdapat *audit expectation gap* antar pengguna laporan keuangan pemerintah daerah satu dengan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyorini (2010) membuktikan bahwa secara empiris terdapat *audit expectation gap* antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu anggota DPRD, pegawai DPPKAD, dan masyarakat pembayar pajak daerah dilihat dari sisi peran auditor, independensi auditor, dan pengetahuan audit yang dilakukan di Kabupaten Sragen.

Penelitian yang dilakukan oleh Aristania (2011) membuktikan bahwa tidak terdapat eksistensi *expectation gap* dilihat dari sisi pelaporan, akuntabilitas, independensi auditor, materialitas, dan audit kinerja. Sedangkan dilihat dari sisi kompetensi auditor, bukti audit, dan pendapat wajar terdapat eksistensi *expectation gap*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yandi (2013) membuktikan bahwa:

- 1) Tidak terdapat *Audit Expectation Gap* dari sisi Pelaporan Audit antara auditor BPK Provinsi Jambi dan pengguna laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Jambi,
- 2) Tidak terdapat *Audit Expectation Gap* dari sisi akuntabilitas antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah,
- 3) Terdapat *Audit Expectation Gap* dari sisi independensi antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah,
- 4) Tidak terdapat *Audit Expectation Gap* dari sisi kompetensi auditor antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah,
- 5) Tidak

terdapat *Audit Expectation Gap* dari sisi materialitas antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah, 6) Terdapat *Audit Expectation Gap* dari sisi bukti audit antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah, 7) Tidak terdapat *Audit Expectation Gap* dari sisi pendapat wajar antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah, 8) Tidak terdapat *Audit Expectation Gap* dari sisi audit kinerja antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Jambi.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Obyek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1.	Porter (1989)	Melakukan penelitian <i>expectation gap</i> antara auditor perusahaan yang diaudit, analis keuangan, investor, manajer bank akademik auditing, ahli hukum dan jurnalis keuangan.	ANOVA	Membuktikan terjadi kesenjangan ekspektasi terhadap kinerja auditor oleh perusahaan yang diaudit, analis keuangan, akademis, jurnalis keuangan, dan ahli hukum dengan kinerja yang diyakini auditor harus diberi.
2.	Humrey <i>et al.</i> (1993)	Melakukan penelitian mengenai persepsi individu terhadap masalah ekspektasi di Britania tentang peran auditor, peraturan dan larangan yang akan dijalankan pada KAP.	ANOVA	Auditor dan partisipan lain berbeda secara signifikan pandangannya pada sifat auditing dan pekerjaan yang dilakukan auditor dan terdapat kekuatan yang menjelaskan dari variabel tertentu dengan keberadaan <i>expectation gap</i> .
3.	Gary S. Monroe dan David R. Woodliff (1993)	Meneliti dampak pendidikan terhadap <i>audit expectation gap</i> .	Mann Whitney tes dan Kruskal-Wallis tes	Menyatakan bahwa pendidikan bisa sebagai pendekatan yang efektif untuk mengurangi <i>audit expectation gap</i> .
4.	Gramling <i>et al.</i> (1996)	Membandingkan mahasiswa yang belum mengikuti auditing dan mahasiswa yang sudah mengikuti auditing secara lengkap serta auditor yang berpengalaman dalam praktek.	ANOVA	Membuktikan bahwa persepsi mahasiswa tentang proses audit dan tanggung jawab auditor berubah setelah mahasiswa menyelesaikan studi auditingnya.

No	Peneliti (Tahun)	Obyek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
5.	Nini Syofri Yeni (2000)	Menguji ada tidaknya perbedaan persepsi terhadap peran dan tanggung jawab auditor diantara mahasiswa, auditor dan pemakai laporan keuangan.	ANOVA	Membuktikan adanya <i>expectation gap</i> antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai peran dan tanggung jawab auditor, di mana auditor mempunyai persepsi yang lebih tinggi dari pada pemakai laporan keuangan terhadap faktor memperbaiki keefektivan audit. Sedangkan pada faktor pengkomunikasian hasil audit tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan.
6.	Saifullah (2003)	Meneliti pengaruh pendidikan terhadap persepsi mahasiswa atas arti laporan audit dan tanggung jawab serta tugas auditor.	Mann Whitney tes dan Kruskal-Wallis tes	Hasil penelitian membuktikan bahwa memang telah terjadi <i>expectation gap</i> , tetapi gap yang terjadi dapat dikurangi melalui pendidikan auditing.
7.	Yuliati <i>et al.</i> (2007)	Melakukan penelitian mengenai keberadaan <i>expectation gap</i> pada sektor publik mengenai tugas dan tanggung jawab auditor.	Uji-t (<i>Independent sample t-test</i>)	Terdapat <i>expectation gap</i> pada faktor mengkomunikasikan hasil audit dan faktor memperbaiki keefektivan audit. Tidak terdapat <i>expectation gap</i> pada faktor mendeteksi dan melaporkan kecurangan dan faktor mempertahankan sikap independensi.

No	Peneliti (Tahun)	Obyek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
8.	Rusliyawati dan Abdul Halim (2008)	Meneliti keberadaan <i>audit expectation gap</i> pada sektor publik.	One-Way ANOVA	Membuktikan adanya perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda dan masyarakat dilihat dari sisi pelaporan, akuntabilitas, dan dari sisi konsep-konsep audit yaitu independensi, kompetensi, pendapat wajar dan audit kinerja.
9.	Setyorini (2010)	Meneliti <i>audit expectation gap</i> antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah mengenai peran auditor, independensi auditor, dan pengetahuan audit.	Kruskal-Wallis tes	Membuktikan bahwa secara empiris terdapat <i>audit expectation gap</i> antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu anggota DPRD, pegawai DPPKAD, dan masyarakat pembayar pajak daerah dilihat dari sisi peran auditor, independensi auditor, dan pengetahuan audit yang dilakukan di Kabupaten Sragen.
10.	Aristania (2011)	Meneliti keberadaan <i>expectation gap</i> pada sektor publik secara empiris.	One Way ANOVA	Membuktikan bahwa tidak terdapat eksistensi <i>expectation gap</i> dilihat dari sisi pelaporan, akuntabilitas, independensi auditor, materialitas, dan audit kinerja. Sedangkan dilihat dari sisi kompetensi auditor, bukti audit, dan pendapat wajar terdapat eksistensi <i>expectation gap</i> .

No	Peneliti (Tahun)	Obyek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
11.	Yandi (2013)	Meneliti keberadaan <i>audit expectation gap</i> dari dimensi laporan audit, akuntabilitas, independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas, bukti audit, pendapat wajar dan audit kinerja antara auditor pemerintah dan pengguna laporan keuangan pemerintah.	Kruskal-Wallis tes	Membuktikan bahwa tidak terdapat <i>audit expectation gap</i> dari sisi pelaporan audit, akuntabilitas, kompetensi auditor, materialitas, pendapat wajar, dan audit kinerja antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Jambi. Sedangkan dari sisi independensi dan bukti audit terdapat <i>audit expectation gap</i> antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Jambi.

C. Hipotesis

Penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris apakah pendidikan pengguna, pelatihan pengguna dan pengalaman pengguna berpengaruh terhadap *audit expectation gap*.

1. Pengaruh pendidikan pengguna terhadap *audit expectation gap*.

Kapasitas individu pada hakekatnya terbentuk dari proses pendidikan secara umum, baik melalui pendidikan secara formal, nonformal, maupun informal. Individu yang berkualitas adalah individu yang memiliki pengetahuan. Pengetahuan audit dari pengguna laporan keuangan pemerintah daerah diyakini dapat mempengaruhi *expectation gap* antara auditor dan pengguna laporan

keuangan pemerintah. Koh dan Woo (1998) menyatakan bahwa pengetahuan dari pengguna laporan keuangan mempengaruhi besarnya *expectation gap*.

Salah satu penyebab *expectation gap* adalah perbedaan persepsi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *expectation gap* terjadi karena adanya faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi. Publik beranggapan bahwa auditor memainkan peranan sebagai “*watchdog*” yang melindungi para pemakai laporan keuangan dari adanya kecurangan-kecurangan (Thomas *et al.*, dalam Yuliati *et al.*, 2007). Dalam menjalankan peran yang sesungguhnya, auditor BPK harus sesuai dengan Undang- undang dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian Monroe dan Woodliff (1993) menyatakan bahwa pendidikan bisa sebagai pendekatan yang efektif untuk mengurangi *audit expectation gap*. Hasil penelitian Saifullah (2003) juga membuktikan bahwa memang telah terjadi *expectation gap*, tetapi gap yang terjadi dapat dikurangi melalui pendidikan auditing.

Suharman dalam Ina (2012) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Pendidikan merupakan salah satu hal yang menciptakan persepsi manusia di mana dengan pendidikan yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memahami apa yang diterimanya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai

macam bentuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempengaruhi cara seseorang mempersepsikan sesuatu yang menimbulkan adanya perbedaan antara individu yang satu dengan individu lainnya.

Faktor pengalaman dan proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk serta struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan faktor pengetahuan memberikan arti terhadap objek yang dipersepsi.

Penelitian Deis dan Giroux dalam Saputra dan Yasa (2013) menunjukkan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Beragamnya jenjang pendidikan (SMA hingga S-3) mencerminkan kemampuan masing-masing anggota tim dalam memberikan kontribusi pada kinerja tim pemeriksaan secara keseluruhan. Pendidikan akan berdampak pada kualitas pekerja itu sendiri dan proses produksi yang dikerjakan. Ini terjadi karena pendidikan mempengaruhi kemampuan tenaga kerja secara mendalam bukan hanya fisik belaka.

Dari sisi pengguna laporan keuangan auditan, tingkat pendidikan yang berbeda yang dimiliki oleh individu membuat persepsi yang berbeda juga karena adanya perbedaan pengetahuan dan pemahaman dari tingkat pendidikan yang berbeda tersebut. Harapannya semakin tinggi tingkat pemahaman pengguna mengenai keuangan akan mengurangi kesenjangan harapan audit karena pengguna dengan tingkat pengetahuan yang tinggi mampu mempersepsikan suatu objek lebih baik dari pengguna dengan tingkat pengetahuan yang rendah

dan memahami bahwa opini wajar yang diberikan oleh auditor BPK tidak berarti bahwa tidak terjadi korupsi di lembaga yang diaudit karena auditor BPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempengaruhi cara individu yang satu dengan individu lainnya dalam memahami objek yang dilihatnya sehingga akan menimbulkan perbedaan persepsi yang akhirnya menimbulkan *expectation gap*. Dari logika berpikir di atas dan dari hasil penelitian terdahulu bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pengguna laporan keuangan maka akan mengurangi *audit expectation gap*.

Berdasarkan teori- teori dan logika berpikir di atas maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendidikan berpengaruh negatif terhadap *audit expectation gap*.

2. Pengaruh pelatihan pengguna terhadap *audit expectation gap*.

Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk selalu memberikan makna terhadap rangsangan yang diterimanya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, yang kemudian individu tersebut memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya itu.

Teori persepsi menyatakan bahwa pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh

pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda- beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Pengetahuan seorang individu salah satunya didapat dari pelatihan yang diikutinya. Pengetahuan audit dari pengguna laporan keuangan pemerintah daerah diyakini dapat mempengaruhi *expectation gap* antara auditor dan pengguna laporan keuangan pemerintah. Koh dan Woo (1998) menyatakan bahwa pengetahuan dari pengguna laporan keuangan mempengaruhi besarnya *expectation gap*.

Penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2015) membuktikan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian tersebut dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan responden yaitu pegawai di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

Semakin pelatihan tersebut menambah pengetahuan pengguna maka akan mempengaruhi persepsi mereka dalam memahami keandalan laporan keuangan auditan dan tanggung jawab auditor BPK sehingga diharapkan mampu mengurangi *audit expectation gap*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna laporan keuangan auditan akan berbeda tergantung dari pelatihan yang mereka ikuti yang akan menambah pengetahuan dari masing- masing individu tersebut. Pengetahuan

yang berbeda yang dimiliki oleh masing- masing individu ini akan menimbulkan perbedaan persepsi yang nantinya akan menimbulkan *audit expectation gap*.

Berdasarkan teori- teori dan logika berpikir di atas maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pelatihan berpengaruh negatif terhadap *audit expectation gap*.

3. Pengaruh pengalaman pengguna terhadap *audit expectation gap*.

Teori persepsi menyatakan bahwa pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. Pengalaman pengguna laporan keuangan auditan diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi sehingga menimbulkan *expectation gap*.

Teori persepsi menyatakan bahwa faktor pengalaman dan proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk serta struktur terhadap apa yang dilihat. Meskipun stimulus yang diterima sama, tetapi karena pengalaman dan kemampuan berfikir yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lain kemungkinan hasil persepsi juga berbeda.

Menurut Lesgold *et al.*, dalam Saputra dan Yasa (2013) seorang ahli yang berpengalaman mampu menemukan hal penting dalam kasus khusus dan mengurangi informasi tidak relevan dalam pengambilan keputusannya. Pengguna yang

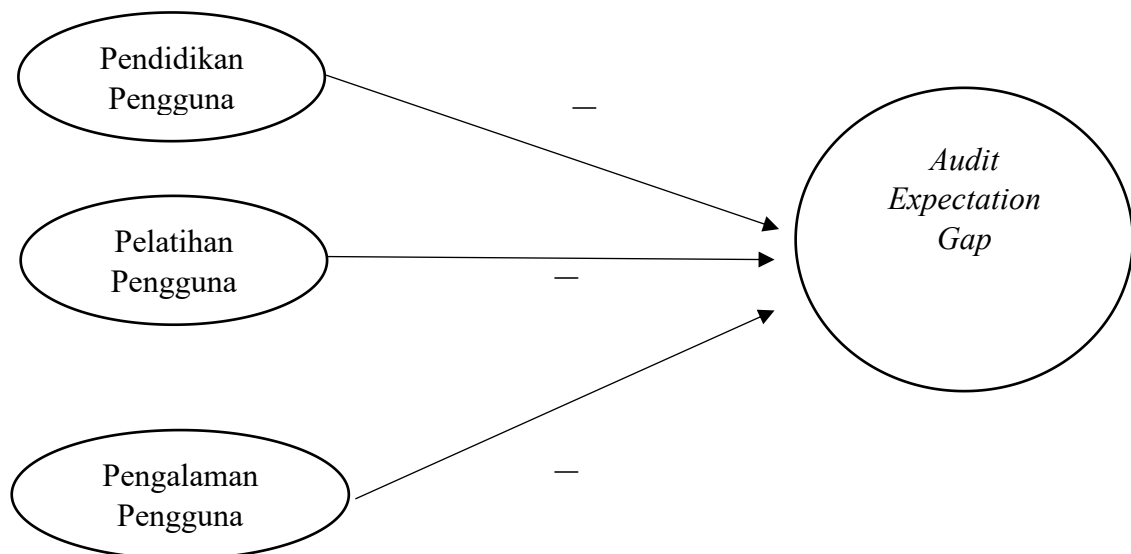
berpengalaman mampu memahami informasi dari laporan hasil pemeriksaan dengan baik sehingga laporan tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pengguna akan menghasilkan persepsi yang berbeda sehingga menimbulkan *audit expectation gap*. Semakin berpengalaman pengguna maka diharapkan akan mampu mengurangi adanya *audit expectation gap*.

Berdasarkan teori-teori dan logika berpikir di atas maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pengalaman berpengaruh negatif terhadap *audit expectation gap*.

D. Model Penelitian



Gambar 1. KERANGKA PENELITIAN